



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Rohana Kudus Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman : <https://kesbangpolkabpessel.go.id> Pos-el : kesbangpolkabpessel7@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 200.1.4.4/92/BKPol-PS/2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI SiMas (SISTEM INFORMASI MASYARAKAT DAN SOSIAL ORMAS)
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA BADAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, inovasi daerah perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka memacu kreativitas daerah untuk terus berinovasi dan perlu didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan, memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi inovasi, maka perlu ditetapkan Inovasi SiMas (Sistem Informasi Masyarakat dan Sosial Ormas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penetapan Inovasi SiMas (Sistem Informasi Masyarakat dan Sosial Ormas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Inovasi Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 adalah SiMas (Sistem Informasi Masyarakat dan Sosial Ormas)

KEDUA : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi SiMas (Sistem Informasi Masyarakat dan Sosial Ormas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran I (satu) dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini.

- KETIGA** : Tim Pelaksana Inovasi SiMas (Sistem Informasi Masyarakat dan Sosial Ormas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Menggerakkan budaya Inovasi SiMas (Sistem Informasi Masyarakat dan Sosial Ormas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ;
 2. Mensosialisasikan Inovasi SiMas (Sistem Informasi Masyarakat dan Sosial Ormas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Inovasi yang telah dilaksanakan ;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Inovasi SiMas (Sistem Informasi Masyarakat dan Sosial Ormas) ke Pimpinan
- KEEMPAT** : Menetapkan Aktor Inovasi SiMas (Sistem Informasi Masyarakat dan Sosial Ormas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran III (Tiga) dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik ini.
- KELIMA** : Menetapkan Jejaring Inovasi SiMaS (Sistem Informasi Masyarakat dan Sosial Ormas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran IV (Empat) dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2026.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 01 Juli 2026

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESIR SELATAN**



KEPALA BADAN

MARZAN, SH., M.M
Pembina (IV. a)

19700316 198903 1 001

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 200.1.4.4/193/BKPol-PS/2026

TANGGAL : 01 Juli 2026

**TENTANG : PENETAPAN INOVASI SiMas (SISTEM INFORMASI MASYARAKAT DAN
SOSIAL ORMAS) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

**NAMA INOVASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

No.	Nama Inovasi	Unit Kerja/ Perangkat Daerah
1.	SiMas (Sistem Informasi Masyarakat dan Sosial Ormas)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



KEPALA BADAN

MARZAN, SH., M.M

Pembina (IV. a)

19700316 198903 1 001

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 200.1.4.4/197/BKPol-PS/2026

TANGGAL : 01 Juli 2026

**TENTANG : PENETAPAN INOVASI SiMas (SISTEM INFORMASI MASYARAKAT DAN
SOSIAL ORMAS) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA INOVASI PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Marzan, S.H., M.M	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Mulyandri, S.T., M.M.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan politik	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ns.Hj Adek Imelda Syam S.Kp, M.A.P	Kepala Bidang Poldagri dan Ormas	Ketua
4.	Apriani, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Ketua
5.	Syafrijef, S.TP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
6.	Hendrawati, S.E	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	Anggota
7.	Vanny Putra Mahendri, S. STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8.	Destri Ira Bahlinda, S.E., M.M.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Okdia Brisvi, S.P.	Perencana Ahli Muda	Anggota
10.	Yeni Hendria, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	Harmah Donna, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
12.	Joko Setiabudi, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Bambang Irawan, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Dali Usman, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15.	Tuti Erza, S.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
16.	Ninece Dewi Syaqli, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
17.	Ira Juniati	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
18.	Alif Hidayat	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
19.	Zulfahmi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
20.	Nora Parnila Sari, S.M	Penata Layanan Operasional IX (PPPK)	Anggota

21.	Mariem	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
22.	Dodi Desmanto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
23.	Gusmaneli Roza	Operatur Layanan Operasional (PPPK PW)	Anggota
24.	Heldi Suhandra	Operatur Layanan Operasional (PPPK PW)	Anggota
25.	Syafrika Maliza, S.IP	Penata Layanan Operasional IX (PPPK PW)	Anggota

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



KEPALA BADAN

MARZAN, SH., M.M

Pembina (IV. a)

19700316 198903 1 001

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 200.1.4.4/193/BKPol-PS/2026
TANGGAL : 01 Juli 2026
**TENTANG : PENETAPAN AKTOR INOVASI SiMas (SISTEM
INFORMASI MASYARAKAT DAN SOSIAL ORMAS) PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

**AKTOR INOVASI SiMas (SISTEM INFORMASI MASYARAKAT DAN SOSIAL
ORMAS) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

NO	NAMA INSTANSI
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Camat Koto XI Tarusan
3.	Camat IV Jurai
4.	Camat Sutera
5.	Camat Lengayang
6.	Camat Ranah Pesisir
7.	Camat Linggo Sari Baganti
8.	Camat Air Pura
9.	Camat Lunang
10.	Camat Silaut

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



KEPALA BADAN

MARZAN, SH., M.M

Pembina (IV. a)

19700316 198903 1 001

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 200.1.4.4/103/BKPol-PS/2026

TANGGAL : 01 Juli 2026

**TENTANG : PENETAPAN JEJARING INOVASI SiMas (SISTEM
INFORMASI MASYARAKAT DAN SOSIAL ORMAS) PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

**PENGELOLA JEJARING INOVASI SiMas (SISTEM INFORMASI
MASYARAKAT DAN SOSIAL ORMAS) PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

NO	NAMA INSTANSI / ORMAS
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia
3.	Keluarga Pedagang Bakso Nusantara
4.	Hukum Adat Silaut
5.	Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia
6.	Yayasan Tarbiyah Islamiyah Ashabul Kahfi
7.	Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK)
8.	Yayasan Ranah Mandeh Sumbang (YAARAHMAN)
9.	Persaudaraan Muslimah
10.	Badan Pembudayaan Kejuangan 45
11.	Keluarga Besar Rang Tanjung
12.	Persaudaraan Setia Hati Terate
13.	Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup
14.	Ikatan Keluarga Anggota Dewan
15.	Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kab. Pessel
16.	Gerakan Indonesia Anti Narkoba (GIAN)
17.	Kaukus Perempuan Politik Indonesia
18.	Srikandi Pemuda Pancasila
19.	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kab. Pessel
20.	National Paralympic Committee Indonesia (NPC) DPC Kab. Pessel
21.	Barisan Pemuda Nusantara
22.	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)
23.	Himpunan Wanita Karya
24.	Perkumpulan Keluarga Perantau Wilayah Lengayang Kecamatan Ranah Pesisir
25.	Perkumpulan Pengajian Ilmu Tasawwuf Thoriqoh Naqsyabandiyah Indonesia (PPI'TNI)
26.	Gerakan Anti Narkotika International (GERANI'T)
27.	Forum Peduli Nagari Punggasan
28.	Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI)
29.	Perkumpulan Pengajian Jam'Iyyatul Islamiyah
30.	Yayasan Administrasi Komunikasi Informasi Nusantara
31.	Perkumpulan Barisan Rakyat Nusantara Republik Indonesia
32.	Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEM)

33.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)
34.	Perkumpulan Wanita Pesisir Selatan (PWPS)
35.	Badan Advokasi Perlindungan Konsumen Cakra Nusantara
36.	Thoriqoh Naqsyabandiyah Indonesia Amirul Aulia Mursyidinal Balai Butari (TNIAAMBB)
37.	Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (PERWIRA)
38.	Persilatan Seni Beladiri Dabua Pasisie
39.	DPC Rumah Hukum Indonesia Kec. Silaut
40.	DPD Rumah Hukum Indonesia Kab. Pesisir Selatan
41.	DPC Rumah Hukum Indonesia Kec. Ranah Pesisir
42.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
43.	Perempuan Elok Pesisir Selatan (PELOPE)
44.	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
45.	Perkumpulan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
46.	Perkumpulan Persatuan UMKM Indonesia

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA BADAN



MARZAN. SH., M.M
Pembina (IV. a)

19700316 198903 1 001